

PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN: TINJAUAN PADA KETIMPANGAN SOSIAL DITENGAH KEMAJUAN EKONOMI DI INDONESIA MELALUI PRINSIP EKONOMI

¹M. Raihan Noer, ²M. Deni Damara, ³Rachel Meylani Situmorang,
⁴Khairani alawiyah matondang

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹raihannoer9@gmail.com, ²deni41922@gmail.com, ³rachelmey54@gmail.com,
⁴khairanialawiyah1404@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the issues of poverty and social injustice in Indonesia that persist despite significant economic progress. This study highlights the inequality in the distribution of economic resources and its impact on marginalized groups. Through an economic ethics approach, this research explores the role of principles of justice, transparency, and social responsibility in supporting inclusive and sustainable policies. The analyzed data shows a striking disparity in poverty levels between regions and unequal access to basic services. This study offers solutions in the form of community empowerment, income redistribution, and governance strengthening as strategic steps to create equitable welfare. With an ethics-based approach, it is hoped that more just and sustainable economic development can be achieved.

Keywords: Poverty, Injustice, Economic Ethics

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis isu kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Indonesia yang terus berlangsung meskipun adanya kemajuan ekonomi yang signifikan. Studi ini menyoroti ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dan dampaknya terhadap kelompok marginal. Melalui pendekatan etika ekonomi, penelitian ini mengeksplorasi peran prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam mendukung kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Data yang dianalisis menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam tingkat kemiskinan antar wilayah dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Studi ini menawarkan solusi berupa pemberdayaan masyarakat, redistribusi pendapatan, dan penguatan tata kelola sebagai langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan pendekatan berbasis etika, diharapkan tercapai pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketidakadilan, Etika Ekonomi

PENDAHULUAN

Kebijakan Perekonomian pada dasarnya memerlukan banyak pertimbangan untuk menentukan hasil pada kebijakan yang dibuat agar mampu ditujukan kepada seluruh masyarakat atau hanya beberapa masyarakat saja yang terkena dampak baik dari kebijakan tersebut. Dalam kebijakan perekonomian juga membahas tentang betapa pentingnya suatu kebijakan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan prinsip keadilan dan keselarasan untuk kebijakan yang dibuat, sehingga kebijakan tersebut mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Apabila suatu negara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan

perekonomian yang adil, maka kemajuan negara tersebut akan terlihat khususnya dibidang perekonomian, oleh karenanya kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan.

Kemajuan ekonomi sering kali dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir, telah mencatat berbagai kemajuan di berbagai sektor, seperti infrastruktur dan industrialisasi. Namun, di balik pencapaian tersebut, terselip ironi yang sulit untuk diabaikan: kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata. Realitas ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keadilan dan keberlanjutan dalam penerapan sistem ekonomi yang berlaku saat ini.

Tabel 1 Data kemiskinan 5 Provinsi di Indonesia (Persen)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Utara	8,63	16,41	9,01	8,42	8,15
Jakarta	3,47	10,19	4,72	4,69	4,44
Kalimantan Barat	7,28	7,32	6,84	6,81	7,03
Jawa Tengah	10,58	11,41	11,14	10,93	10,77
Papua Barat	21,66	21,70	19,97	21,43	20,49

Sumber: Badan Pusat Statisti (BPS)

Ketimpangan tersebut terlihat jelas dari perbedaan signifikan pada persentasi kemiskinan yang dihitung melalui distribusi pendapatan. Sebagian kecil kelompok elite di Indonesia menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara sebagian besar masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam dimensi sosial, tetapi juga menyiratkan adanya persoalan moral, terutama dalam memastikan bahwa prinsip keadilan distribusi mendapat perhatian yang memadai dalam penyusunan dan implementasi kebijakan ekonomi.

Dalam perspektif etika ekonomi, ketimpangan seperti ini dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam aktivitas ekonomi. Etika ekonomi mengajarkan pentingnya menciptakan harmoni antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan kelompok yang rentan. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem kapitalisme modern yang mendominasi ekonomi Indonesia sering kali lebih berfokus pada pencapaian keuntungan material ketimbang memperhatikan keberlanjutan moral dan keadilan sosial.

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi akar permasalahan kesenjangan sosial yang terus berlangsung di tengah kemajuan ekonomi Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ekonomi, sehingga solusi yang diusulkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga bermuatan nilai-nilai moral. Dengan cara ini, penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan baru yang relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Etika ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong penerapan kebijakan yang tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan hidup yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban untuk saling mendukung demi terciptanya keadilan distributif. Melalui kebijakan yang dilandasi etika ekonomi, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, melainkan merata hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah.

Selain itu, etika ekonomi juga menawarkan panduan bagi pelaku ekonomi untuk mengutamakan keberlanjutan ekosistem sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara kolektif. Ketika kebijakan ekonomi didasari oleh pertimbangan moral, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global, seperti krisis lingkungan dan perubahan iklim, karena prioritas pembangunan telah diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian kehidupan.

Berdasarkan data yang diperoleh serta berbagai kebijakan yang dibuat di Indonesia selama beberapa dekade terakhir yang menjadikan dorongan penelitian ini dilaksanakan untuk melihat hasil dari berbagai kebijakan dan prinsip etika ekonomi yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, serta dengan berbagai teori dari penelitian terdahulu.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi berbagai negara di dunia. Menurut Yacoub (2012), kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga dianggap sebagai persoalan global. Sementara itu, World Bank (2004) menyebutkan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Selain itu, kemiskinan seringkali dikaitkan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, di mana mereka yang hidup dalam kemiskinan cenderung menganggur dan memiliki tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah.

Menurut Adisasmita (2005), terdapat berbagai indikator kemiskinan yang umumnya digunakan untuk mengukur kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Indikator tersebut meliputi tingkat pendapatan, upah, konsumsi, mortalitas balita, cakupan imunisasi, tingkat gizi anak, fertilitas, kematian ibu, harapan hidup, dan akses pendidikan dasar. Selain itu, indikator lainnya mencakup proporsi anggaran pemerintah untuk kebutuhan dasar, ketersediaan pangan (kalori/protein), akses air bersih, pertumbuhan populasi, tingkat literasi, urbanisasi, pendapatan per kapita, serta distribusi pendapatan.

Sudarso (1996) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan, tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap sumber daya produktif, seperti pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan akses ekonomi dan sosial.

Suryadarma (2003) berpendapat bahwa kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pembangunan antar daerah. Ia menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi faktor utama penyebab kemiskinan struktural. Oleh karena itu, ia mengusulkan kebijakan desentralisasi dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi kemiskinan.

Etika Ekonomi

Desiana (2017) Secara terminologi, etika dapat diartikan sebagai kajian yang terstruktur dan mendalam mengenai konsep-konsep nilai, seperti kebaikan, keburukan, kebenaran, kesalahan, serta kewajiban moral. Etika juga mencakup prinsip-prinsip mendasar yang memberikan dasar bagi manusia untuk menilai dan menerapkan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks individu, etika terwujud dalam bentuk kesadaran moral, yaitu keyakinan yang membimbing seseorang untuk memahami dan menentukan apakah sesuatu dianggap benar atau salah. Dengan kata lain, etika adalah

kebiasaan, pola pikir, atau sikap yang mengacu pada nilai-nilai moral, yang menjadi pedoman dalam membedakan mana yang baik dan buruk dalam berperilaku.

Menurut pandangan Richard De George, keberhasilan sebuah perusahaan di pasar bergantung pada tiga faktor utama: kualitas produk yang unggul, efisiensi dalam pengelolaan, dan penerapan etika dalam bisnis. Meski teori-teori manajemen dan ekonomi telah banyak membantu perusahaan mencapai pengelolaan yang efisien, perkembangan dalam bidang etika bisnis masih terbilang minim. Hal ini terjadi meskipun berbagai program dan inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan praktik bisnis. Kendati demikian, pengakuan terhadap pentingnya etika sebagai bagian integral dalam dunia usaha serta diskusi yang semakin luas mengenai topik ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam cara pandang terhadap etika perusahaan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh secara sekunder melalui jurnal, berita dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan landasan data penelitian. Teknik mengolah data pada penelitian ini menggunakan deskriptif dengan mendeskripsikan dan menganalisis data melalui nilai dan grafik yang ada pada nilai kemiskinan. Teknik lain digunakan dalam penelitian ini ialah membandingkan penelitian terdahulu dengan kenyataan pada saat ini dan bagaimana keduanya dapat saling berkesinambungan khususnya bagaimana prinsip etika ekonomi dapat dilaksanakan. Hasil akhir penelitian ini akan menentukan sejauh mana efektifitas kebijakan perekonomian dilakukan di Indonesia serta prinsip etika ekonomi yang diterapkan untuk mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika ekonomi adalah seperangkat nilai dan norma moral yang memandu perilaku individu, perusahaan, dan institusi ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ini adalah semacam kompas moral yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Etika ekonomi merupakan landasan moral yang krusial dalam dunia bisnis modern. Prinsip-prinsip etika tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan yang kuat dengan berbagai pihak terkait, mulai dari konsumen hingga masyarakat luas. Dengan menjunjung tinggi etika, perusahaan dapat menghindari konflik yang seringkali timbul akibat praktik bisnis yang tidak adil. Lebih jauh lagi, etika mendorong perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang lebih baik, karena reputasi baik dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan menjadi aset berharga. Tak kalah penting, etika ekonomi juga mendorong perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial dan lingkungan, sehingga menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Etika memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan kebijakan ekonomi, di mana ia berfungsi sebagai landasan moral yang menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, etika tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang tindakan yang seharusnya diambil dalam berbagai aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian atau dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai etika dalam kebijakan ekonomi akan mendorong

terciptanya lingkungan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat.

Prinsip Etika Ekonomi

Prinsip etika ekonomi adalah kompas moral yang memandu setiap tindakan dan keputusan dalam dunia ekonomi atau bisnis. Lebih dari sekadar aturan, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan berkelanjutan, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Sejak zaman dahulu, prinsip-prinsip ini telah menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi dan terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan, prinsip etika ekonomi semakin relevan, menjadi pedoman bagi pelaku bisnis untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, baik dari perspektif lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Berikut ini beberapa prinsip etika ekonomi yang penting:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan perlakuan yang adil dan setara terhadap setiap individu dalam seluruh aspek transaksi ekonomi. Hal ini mencakup pengakuan yang jelas terhadap hak-hak setiap individu, pemenuhan kewajiban yang telah disepakati, serta penegakan norma-norma etika yang menjamin bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kepercayaan dan kolaborasi dapat berkembang dengan baik.

2. Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Prinsip kejujuran dan transparansi merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam etika bisnis, di mana kejujuran berfungsi sebagai pilar utama yang mendukung integritas organisasi. Perusahaan diharuskan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai praktik mereka, termasuk informasi keuangan, kebijakan operasional, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Dalam konteks etika ekonomi, transparansi bukan hanya sekadar kewajiban informasi, tetapi juga merupakan strategi vital untuk membangun kepercayaan yang kuat di antara pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat luas.

Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kejujuran dalam komunikasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami risiko dan peluang yang ada, serta memperkuat hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan terhubung, penerapan prinsip kejujuran dan transparansi menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang etis, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap individu dan organisasi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ini berarti bahwa mereka harus dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi dari pilihan yang dibuat, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan transparansi dalam hubungan antar pihak. Dalam lingkungan yang menjunjung tinggi prinsip ini, setiap tindakan dipandang sebagai bagian dari proses yang lebih

besar, di mana integritas dan etika menjadi landasan dalam setiap keputusan yang diambil.

4. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang berjangka panjang. Dalam konteks etika ekonomi, hal ini berarti bahwa keputusan bisnis tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi ekosistem, masyarakat, dan generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi ekonomi, perusahaan dan individu dapat berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama. Pendekatan ini mendorong tanggung jawab kolektif untuk menciptakan nilai yang tidak hanya bermanfaat bagi pemangku kepentingan saat ini, tetapi juga menjaga sumber daya dan kualitas hidup bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi landasan etis yang penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan.

5. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Prinsip tanggung jawab sosial menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi positif tidak hanya kepada pemangku kepentingan mereka, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam konteks etika ekonomi, tanggung jawab sosial mencerminkan kesadaran yang mendalam akan dampak bisnis terhadap masyarakat luas, serta perlunya untuk beroperasi dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan etis.

Cara Untuk Menerapkan Etika Ekonomi Secara Efektif

Penerapan etika ekonomi secara efektif memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan ekonomi didasari oleh prinsip-prinsip yang jelas dan transparan. Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama, prinsip-prinsip etika ekonomi dapat berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Melalui integrasi etika ekonomi, negara dapat fokus pada pengentasan kemiskinan, promosi kesetaraan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Etika ekonomi tidak hanya berfokus pada distribusi pendapatan yang lebih adil, tetapi juga pada perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Dengan demikian, prinsip-prinsip etika ekonomi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, mempromosikan stabilitas politik, dan membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, implementasi etika ekonomi juga memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder*, mulai dari kalangan bisnis, akademisi, organisasi nirlaba, hingga masyarakat sipil. Melaluinya, kita dapat menciptakan solusi yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi tidak saja efektif tapi juga efisien dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, penerapan etika ekonomi bukanlah sekedar teori abstrak, namun merupakan strategi nyata untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan menjaga keberlanjutan ekosistem global.

Terdapat beberapa cara untuk memastikan bahwa penerapan etika ekonomi berjalan secara efektif, dan yang utama adalah melibatkan para pemangku kepentingan. Penerapan etika ekonomi yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Setiap pemangku

kepentingan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dengan memperkuat program-program perlindungan sosial dan memberikan insentif bagi usaha-usaha yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

Cara Pengentasan Kemiskinan Dengan Mengutamakan Keadilan

Pengentasan kemiskinan dengan mengutamakan keadilan sosial dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip etika ekonomi, yang berfungsi sebagai panduan moral dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar dan menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan, penerapan etika ekonomi dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap aspek kebijakan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan strategi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang merata. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Terdapat beberapa cara pengentasan kemiskinan dengan mengutamakan keadilan, yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling mendukung. Pertama, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas harus diberikan kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, penyediaan akses kredit mikro dengan bunga yang terjangkau sangat penting, sehingga masyarakat miskin dapat memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, individu akan lebih mampu bersaing di pasar kerja dan meningkatkan pendapatan mereka. Ini sejalan dengan prinsip hak pribadi dan kepemilikan dalam etika ekonomi, yang menghargai kemampuan individu untuk mengembangkan potensi mereka.

2. Retribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan dapat dilakukan melalui strategi yang efektif dan adil. Salah satunya adalah menerapkan pajak progresif, yang bertujuan untuk membebani kelompok pendapatan tinggi lebih besar daripada kelompok rendah. Selain itu, penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat rentan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya lainnya adalah menetapkan upah minimum yang layak untuk melindungi pekerja berpendapatan rendah, sehingga mereka dapat hidup dengan standar yang lebih baik.

3. Penegakan Hukum yang Baik

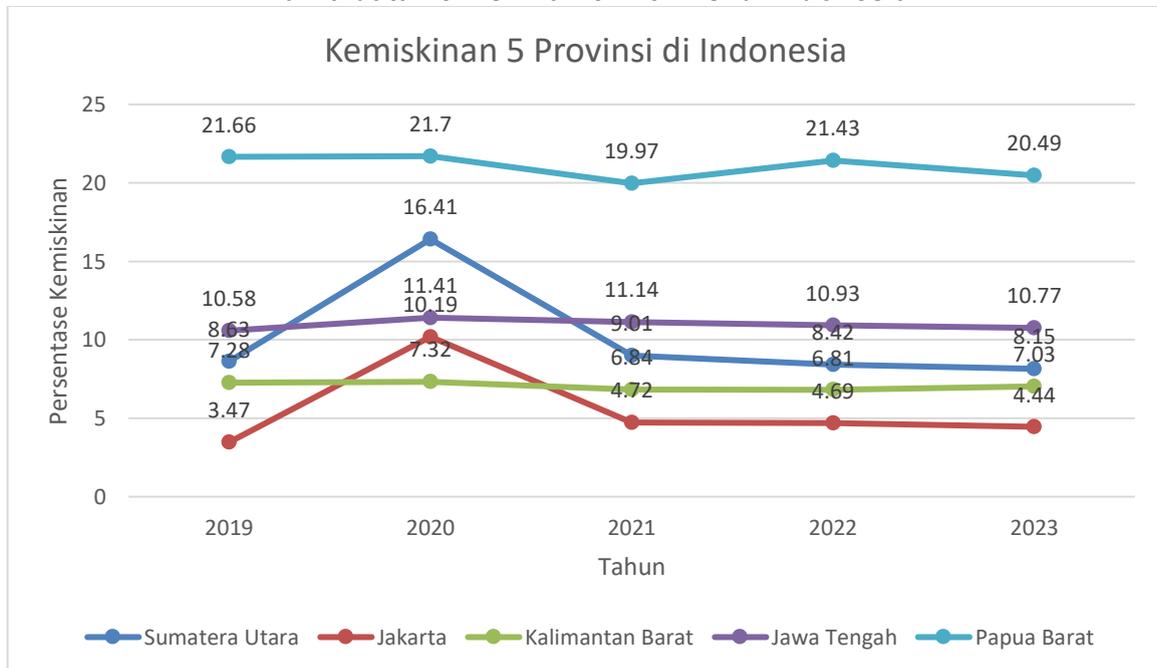
Penegakan hukum dan tata kelola yang baik merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan transparan. Salah satu langkah penting adalah menerapkan hukum secara tegas terhadap tindakan korupsi dan ketidakadilan, sehingga pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tak kalah pentingnya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik akan memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat didengar.

4. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur yang merata adalah langkah fundamental dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat miskin dapat memiliki akses yang setara terhadap fasilitas publik. Dalam konteks etika ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya dilihat sebagai investasi fisik, tetapi

juga sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Dengan memastikan aksesibilitas layanan publik yang mudah, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih, kita tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam kebijakan ekonomi, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.

Kurva data kemiskinan 5 Provinsi di Indonesia



Berdasarkan kurva diatas dapat dianalisis bahwa terjadi ketimpangan yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Provinsi Papua Barat terlihat memiliki persentasi kemiskinan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun, dengan 21,43% menjadi nilai tertinggi persentase kemiskinan di tahun 2022 dan 19,97% persentase kemiskinan terendah di Papua Barat. Provinsi Sumatea Utara memiliki kurva yang berfluktuasi tajam diamana pada tahun 2020 persentase kemiskinan naik menjadi 16,41% menjadi angka tertinggi di wilayah tersebut dalam kurun waktu 5 tahun, kemudian 6,81% yang merupakan angka terendah persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pada Provinsi Jawa Tengah terlihat kurva berfluktuasi namun tidak terlalu signifikan dan curam, hal ini bisa dilihat dengan nilai tertinggi persentase kemiskinan sebesar 11,41%, dan 10,77% persentase terendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Selanjutnya Provinsi Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat persentase kemiskinan paling rendah dibandingkan empat wilayah lainnya. Terlihat bahwa Provinsi Jakarta sempat mengalami kenaikan menjadi 7,32% pada tahun 2020 dan kembali turun drastis menjadi 4,44% pada tahun 2023, meskipun persentase terendah di wilayah Jakarta ada pada tahun 2019 yaitu 3,47%. Namun apabila dibandingkan dengan wilayah lain, kurva jakarta terlihat mendominasi posisi paling bawah, dimana dengan tingkat kemiskinan yang cenderung rendah menjadikan Provinsi ini sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah pada penelitian ini. Sementara Ketimpangan juga terjadi pada Papua Barat, dimana provinsi tersebut memiliki persentase kemiskinan yang sangat tinggi, hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintahan pusat untuk mampu mengatasi kemiskinan dengan tetap mendasarkan pada prinsip keadilan untuk kesejahteraan wilayah lain yang masih timpang dengan wilayah perkotaan seperti Provinsi Jakarta.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil keseluruhan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Ketimpangan distribusi sumber daya, yang sering kali diperparah oleh kebijakan yang kurang efektif, mengharuskan pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi terbukti menjadi solusi yang efektif. Selain itu, redistribusi pendapatan dan transparansi dalam tata kelola publik juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Demi keberlanjutan solusi, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan program-program pengentasan kemiskinan. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja serta memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat mempercepat dampak positif. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua Barat. Pendekatan berbasis etika ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Culture of Poverty in Poverty Reduction in Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Alisyah, J. (2024). Tantangan Etika Ekonomi Dalam Perdagangann Global: Implikasi dan Solusi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 672-682.
- Fahrurrozi, M., Tiris Sudrartono, S., Eka Hendrayani, H., & Lisawanto, L. (2021). Managerial Economics in Managerial Decision Making. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, 12.
- Mulyawan, Wawan. (2024). Evaluasi Etika Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bima: Menjaga Dignitas dan Kesejahteraan Masyarakat. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 85-100.
- Nafi'ah, Bariyyatin. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953-960.
- Putra, T. S. W. (2024). Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham Sebagai Basis Posisi Etis Ekonomi Pancasila di Indonesia. *Econimie; Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 169-185.
- Rahmah, Syahidah. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 164-177.
- Satria, M., T, dkk. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Mendalam dan Implikasi. *Central Publisher*, 1(6), 611-617.

- Septiani, A., dkk. (2022). Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140-148.
- Surajiyo. (2023). Teori-Teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis. *Jurnal Senada*, 6(1), 259-265.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- World Bank. (2023). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: World Bank Group.
- Warsiati, W., Sudartono, T., & Dewi, R. PERANAN KOPERASI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI EKONOMI PANCASILA DI ERA DIGITAL.
- Wulandari, sari, dkk. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.
- Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2023). Budaya korupsi: Ketimpangan sosial ekonomi antar pejabat negara dan masyarakat akibat pandemi. *Jurnal sosial dan sains*, 3(12), 1328-1337.